



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2018 RSUD dr. SOEDONO MADIUN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEDONO MADIUN
Jl. Dr. Soetomo no. 59 Madiun
Telp. (0351) 464325-464326 Fax. (0351) 458054

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD dr. Soedono Madiun Tahun 2018 dibuat untuk bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2018. Dalam buku Renja Perubahan RSUD dr. Soedono Madiun Tahun 2018 yang disusun berisi : pendahuluan, evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu, tujuan dan sasaran perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan perangkat kerja, serta penutup.

Pada Renja Perubahan Tahun 2018 untuk belanja langsung membutuhkan anggaran sebesar Rp. 256.062.709.829,51 terdiri dari Anggaran Subsidi sebesar Rp. 39.628.097.954,00 dan Anggaran Fungsional sebesar Rp. 216.434.611.875,00

Prioritas kegiatan dan pembangunan tahun 2018 adalah penyelesaian pembangunan gedung trauma center dan intensif care 8 lantai (tahap II), penataan Sistem Informasi RS (SIM RS), upaya penurunan GDR – NDR, persiapan akreditasi RS serta fokus persiapan akreditasi RS Pendidikan.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra RSUD dr. Soedono Madiun tahun 2014 – 2019. Program dalam Rencana Kerja Tahun 2018 ada 7 program yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah, Program Penyusunan Pengendalian & Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan, Program Peningkatan Sarana & Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); serta Program Pembinaan Lingkungan Sosial untuk anggaran DBHCHT

Dengan program yang hanya berjumlah 7 tersebut akan memberikan kemudahan dalam meletakkan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan secara profesional dan sesuai standart pelayanan yang ditetapkan.

DAFTAR ISI

Sampul depan	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I : Pendahuluan.....	4
I.1. Latar Belakang	4
I.2. Landasan Hukum	5
I.3. Maksud dan Tujuan.....	6
I.4. Sistematika Penulisan	
BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu.....	8
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	8
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	15
II.3. Isue-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	17
II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	19
II.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat	23
BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	26
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	26
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	26
III.3. Program dan kegiatan.....	27
BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	35
IV.1. Prioritas Provinsi	35
IV.2. Prioritas Perangkat Daerah	35
IV.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	37
BAB V : Penutup.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Permendagri No. 54 Tahun 2010 mewajibkan setiap perangkat SKPD untuk menyusun rencana strategis (Renstra) sebagai proyeksi program / kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Dari dokumen Renstra selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja (Renja) RSUD Dr. Soedono Madiun tahun 2018 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan rujukan di rumah sakit agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Dr. Soedono Madiun Tahun 2018 terutama berpedoman pada Rencana Strategis RSUD Dr. Soedono Madiun Tahun 2014 – 2019 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan program Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025 , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014 – 2019 serta RKPD provinsi Jawa Timur.

Rencana Kerja RSUD Dr. Soedono Madiun tahun 2018 ini selaras dengan prioritas pembangunan serta arah kebijakan umum tahun 2014-2019 pada point 2 yang menyebutkan “Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.

Selanjutnya Rencana Kerja RSUD Dr. Soedono Madiun tahun 2018 merupakan tahun keempat dalam matriks Renstra 2014 – 2019 dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA 2018. Pada Renja Tahun 2018 terdiri dari 6 program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
6. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
7. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan RSUD dr. Soedono Madiun tahun 2018 dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun 2018 untuk bahan penyusunan APBD tahun 2018, selain itu merupakan bagian dari proses penilaian kinerja instansi pemerintah yang nantinya dievaluasi dan disusun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip).

I.2. Landasan Hukum

Dasar hukum untuk penyusunan Rencana Kerja RSUD Dr. Soedono Madiun tahun 2018 mengacu pada :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4285);
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud:

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Perubahan RSUD Dr. Soedono Madiun Tahun 2018 ini dimaksudkan agar :

- a. Program dan kegiatan Tahun 2018 sesuai dengan Rencana Strategis RSUD Dr. Soedono Madiun Tahun 2014 – 2019, Program dan Kegiatan (RKPD) Provinsi Jawa Timur, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019
- b. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD Dr. Soedono Madiun tahun 2018 bertujuan untuk :

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Renstra RSUD dr. Soedono Madiun dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pelayanan kesehatan khususnya di RSUD Dr. Soedono Madiun selama 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.
- b. Evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun sebelumnya, dan sebagai bahan untuk penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya.

1.4 Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Perubahan RSUD dr. Soedono Madiun Jawa Timur Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

- 4.1. Prioritas Provinsi
- 4.2. Prioritas Perangkat Daerah;
- 4.3. Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan perkiraan capaian pelaksanaan Renja Tahun 2018 yang mengacu pada APBD yang berjalan tertera berikut ini.

1. Program Pelaksanaan Administrasi Perkantoran terdiri dari 1 kegiatan yaitu ;

1.1.Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp 1.504.417.000,- realisasi sebesar Rp. 1.337.581.429,- atau 88,91%. Dengan target kinerja jumlah paket pengadaan barang dan jasa 50 paket untuk mendukung kegiatan pelayanan administrasi perkantoran atau tercapai 100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1 Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 4.849.068.000,- realisasi sebesar Rp. 4.533.383.994,- (93,49%). Dengan target kinerja tersedianya penyediaan sarana prasarana RS untuk air, listrik dan telepon selama 12 bulan sudah tercapai 100%

2.2.Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 412.465.000,- realisasi sebesar Rp. 402.828.450,- (97,66%). Dengan target kinerja jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar 147 unit dan realisasi 143 unit atau capaian 97,3%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

3.1 Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 921.745.000,- realisasi sebesar Rp. 893.269.312,- (96,91%). Dengan target kinerja jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan selama 12 bulan dan realisasi capaian 100%.

3.2 Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 1.851.375.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.518.480.046,- (82,02%). Dengan target kinerja jumlah kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas SDA dan jumlah pegawai yang menjadi peserta dalam peningkatan kapasitas SDA sebanyak 158 orang atau realisasi tercapai 79 %

4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari 3 kegiatan yaitu :

- 4.1 Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 92.625.000,- dan realisasi sebesar Rp.75.514.800,- (81,53%). Dengan target kinerja 6 dokumen perencanaan yang tersusun dan realisasi sejumlah 6 buku dokumen atau capaian 100%.
- 4.2 Kegiatan : Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 60.960.000,- dan realisasi sebesar Rp. 44.519.500,- (73,03%). Dengan target kinerja jumlah dokumen pelaporan yang tersusun sejumlah 5 buku dokumen dan realisasi sejumlah 5 buku dokumen laporan atau capaian 100%.
- 4.3 Kegiatan : Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 52.660.000,- dan realisasi sebesar Rp. 17.215.000,- (32,69%). Dengan target kinerja jumlah update data SKPD yang dilaksanakan selama 12 bulan realisasi sebesar 12 bulan atau capaian 100%.

5. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terdiri dari 6 kegiatan yaitu :

- 5.1 Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 14.734.343.810,- dan realisasi sebesar Rp. 14.125.114.794,- (95,87%). Dengan target kinerja jumlah paket pengadaan alat kedokteran sejumlah 8 paket untuk peningkatan pelayanan kesehatan realisasi sebesar 8 paket atau capaian 100%.
- 5.2 Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas dengan anggaran sebesar Rp. 80.945.386.521,- dan realisasi sebesar Rp. 53.012.381.849,- (65,78%). Dengan target kinerja jumlah tersedianya gedung trauma center dan intensive care 1 unit dan realisasi 1 paket atau capaian 100%.
- 5.3 Kegiatan : Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 905.725.165,- dan realisasi Rp. 858.612.002,- (94,80%).
Dengan target kinerja jumlah paket pengadaan alat kedokteran 1 paket dan tercapai 1 paket atau capaian 100%.

6. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan : Penguatan pelayanan RS / RS Khusus dengan anggaran sebesar Rp. 215.490.916.122,01 terealisasi sebesar Rp. 201.293.128.353,- (93,41%). Dengan target kinerja jumlah pasien rawat jalan

160.000 org dan jumlah pasien rawat inap 16.000 orang, pada tahun 2017 jumlah pasien rawat jalan 215.959 orang dan jumlah pasien rawat inap .20.326 orang (tercapai 135% dan 127 %)

2.1.1. Faktor – faktor tidak tercapainya target

Faktor – faktor tidak tercapainya target adalah :

a. Tenaga

Jumlah tenaga ada yang belum memenuhi standart kebutuhan.

b. Sarana Prasarana

➤ Kebijakan penataan ulang IT RS untuk menunjang Sistem Manajemen Informasi RS yang dimulai pelaksanaannya pada tahun 2018. Selain itu untuk penyerapan anggaran operasional (sumber dana fungsional) tidak bisa maksimal karena adanya efisiensi anggaran serta adanya pengelolaan layanan BPJS yang belum maksimal dimana peningkatan jumlah pasien belum seimbang dengan pendapatan RS (terkait sistem verifikasi pasien BPJS)

➤ Terbatasnya anggaran untuk penyelesaian pembangunan trauma center dan intensif care 8 lantai, sehingga pembangunan tidak optimal dan belum bisa digunakan

c. Pembenahan Alur

Dengan adanya pembangunan fisik gedung / rehabilitasi bangunan, perlu dilakukan penataan ulang ruang perawatan dan alur pasien, serta pengadaan papan petunjuk arah / informasi.

2.1.2. Implikasi yang timbul terhadap capaian Renstra

Pada tahun 2017 sudah dilakukan penyesuaian terhadap Renstra Perubahan dan RPJMD Perubahan. Sesuai dengan RPJMD Perubahan 2014 – 2019, Renstra Perubahan RSUD dr. Soedono Madiun hanya menggunakan 6 Program. Namun pada tahun 2018 / 2019 ini ada penambahan 1 program yaitu Program Pembinaan Lingkungan Sosial khusus untuk kegiatan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Evaluasi pencapaian sebagaimana tabel dibawah ini.

2.1.3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

Dari hasil evaluasi terhadap pencapaian target dan dikaitkan dengan renstra, perlu ada kebijakan / tindakan untuk pencapaian target yaitu :

- a. Penyelesaian pembangunan gedung trauma center dan intensive care 8 lantai (tahap III)
- b. Pembangunan gedung untuk parkir
- c. Penataan sistem informasi RS (SIM RS)
- d. Upaya penurunan angka GDR dan NDR
- e. Penataan pengelolaan pelayanan BPJS
- f. Pemantapan Zona Integritas

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD RSUD dr. Soedono Madiun s/d Tahun 2016 – 2018 tertera di bawah ini :

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2018
PROVINSI JAWA TIMUR

Nama SKPD : RSUD Dr. SOEDONO MADIUN

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (tahun 2018)			
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1		Urusan Pemerintahan										
102	0400	Bidang Urusan Kesehatan										
102	0400	01	Program Administrasi perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat / aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	13.773.604.570	3.704.901.206	1.504.417.000	1.337.581.429	88,91%	3.541.577.277	8.584.059.912	62,32%
*) capaian kinerja					100%	100%	100%	78,83%	78,83%	100%	78,83%	78,83%
		019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Prosentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	13.773.604.570	3.704.901.206	1.504.417.000	1.337.581.429	88,91%	3.541.577.277	8.584.059.912	62,32%
					100%	100%	100%	78,83%	78,83%	78,83%	78,83%	78,83%
*) capaian kinerja					100%	100%	100%	78,83%	78,83%	100%	78,83%	78,83%
102	0400	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	30.462.522.146	12.858.606.537	5.261.533.000	4.936.212.444	93,82%	5.600.000.000	23.394.818.981	76,80%
*) capaian kinerja					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	24.590.377.006	9.695.811.627	4.849.068.000	4.533.383.994	93,49	4.480.000.000	18.709.195.621	76,08%
*) capaian kinerja						162 paket	100 paket	50 paket	50 paket	100%	6 paket	156 paket	96,29%
			031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	5.872.145.140	3.162.794.910	412.465.000	402.828.450	97,66%	1.120.000.000	4.685.623.360	79,79%
*) capaian kinerja						450 unit	100	147	143	97,28%	150	393	87,33%
102	0400	07		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	7.110.323.443	3.607.112.747	2.773.120.000	2.411.749.358	86,97%	940.509.723	6.959.371.828	97,88%
*) capaian kinerja						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			001	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	3.180.897.877	1.977.192.905	921.745.000	893.269.312	96,91%	679.684.723	3.550.146.940	111,61%
*) capaian kinerja						60 bulan	36	12	12	100%	12	48	80%
			002	Lama : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Baru : Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	1. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan / pelatihan formal 2. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan pembinaan kapasitas SDM	3.929.425.566 514 orang 180 orang	1.629.919.842	1.851.375.000	1.518.480.046	82,02%	260.825.000	3.409.224.888	86,76%
*) capaian kinerja						514 orang 180 orang	300 0	200 0	155 0	77,5% 0	7 90	462 90	89,88% 50%

102	0400	08		Program Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	931.793.550	294.601.100	206.245.000	137.249.300	66,55	215.000.000	646.850.400	69,42
*) capaian kinerja						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	385.453.750	124.310.500	92.625.000	75.514.800	81,53%	90.000.000	306.935.500	79,63
*) capaian kinerja						31 dokumen	13	6	6	100%	6	25	80,65%
			002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	289.099.800	96.750.600	60.960.000	44.519.500	73,03%	60.000.000	201.270.100	69,62
*) capaian kinerja						25 dokume	10	5	5	100%	5	20	80%
			003	Penyusunan , Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah update Database Perangkat Daerah 20 kali	227.240.000	73.540.000	52.660.000	17.215.000	32,69%	50.000.000	140.755.000	61,94
*) capaian kinerja						44 kali	24	12	12	100%	4	40	90,90%
				Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun						15.000.000		
*) capaian kinerja						4 dokumen	-	-	-	-	2	2	50%
102	0400	47		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Prosentase pemenuhan pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana sesuai standart	484.061.022.750	165.435.777.322	96.585.455.496	68.074.493.145	70,48	19.351.010.954	252.861.281.421	52,24%
*) capaian kinerja						95%							

			006	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)	Jumlah alat kesehatan	23.451.390.489	8.717.046.679	14.734.343.810	14.125.114.794	95,87%	14.351.010.954	37.193.172.427	158.60%
*) capaian kinerja						12 paket	4	1	1	100%	4	9	75%
			007	Pendampingan Pelayanan Kesehatan (DAK)			108.936.672						
102	0400	47	010	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang pasien, Laundry, ruang tunggu, dll) RS/RSK/Balai / Akper/Latkesmas			97.955.000						
			011	Pengadaan Alat Kesehatan / Lab RS/RSK / Balai / Akper / Latkesmas			2.900.793.500						
			013	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan bagi Penderita akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)			37.427.613.664	53.984.872.425	53.079.147.260	98,32%			
			014	Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper /Latkesmas	Jumlah tersedianya gedung trauma center dan intensive care	193.404.461.000	63.104.284.547	80.945.386.521	53.090.766.349	65,59	0	116.195.050.896	60,08%
*) capaian kinerja						13 paket	6	3	3	100%	1	10	77%

102	0400	48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Persentase pelayanan yang memenuhi standart pelayanan minimal;	968.275.765.876	375.261.316.002	215.490.916.122	201.293.128.353	93,41	190.000.000.000	766.554.444.355	79,17%
					97%					97%	97%	
				% pencapaian indikator pelayanan RS;	100%				100%	100%		
				% pegawai RS yang mengikuti pelatihan;	60%				60%	60%		
				% kelulusan peserta didik yang menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS	85%				85%	85%		
		001	Penguatan Pelayanan RS / RS Khusus	Prosentase pemenuhan biaya operasional Rumah Sakit	968.275.765.876	375.261.316.002	215.490.916.122	201.293.128.353	93,41	190.000.000.000	766.554.444.355	79,17%
*) capaian kinerja					80%	80%	100%	87,72%	87,72%	80%	80%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Soedono Madiun

- Untuk pelayanan rawat inap tahun 2017 tempat tidur sebanyak 347 buah dengan tingkat pemanfaatan BOR 66,19% (standart Depkes 60% - 85%), ALOS 5 hari (standart Depkes 6 – 9 hari), BTO 58 kali/tahun (standart Depkes 40 – 50 kali/tahun) dan TOI 2 hari (standart Depkes 1 – 3 hari). Untuk BOR, ALOS dan TOI masih batas standart Depkes RI. Untuk BTO (bed turn over / pemakaian tempat tidur rs) melebihi ambang batas ideal artinya pemakaian tempat tidur rumah sakit sangat sering sehingga memungkinkan timbulnya infeksi nosokomial. Perlu segera dilakukan penataan ulang tempat tidur rumah sakit agar lebih efektif dan efisien, serta pemanfaatan TT RS bisa optimal.
- Untuk nilai GDR 98,90‰ (standart Depkes ≤ 45 ‰) dan nilai NDR 58,34‰ (standart Depkes ≤ 25 ‰) yang masih tinggi dikarenakan pasien yang datang ke RSUD dr. Soedono Madiun rata – rata merupakan pasien rujukan dari unit layanan kesehatan wilayah sekitar RSUD dr. Soedono Madiun. Mekanisme rujukan berjenjang yang mengoptimalkan RS Daerah / RS Pratama Kabupaten Kota, mengakibatkan kasus kematian terbanyak disebabkan karena kondisi pasien yang datang sudah memburuk / parah.
- Untuk indeks kepuasan masyarakat (IKM) tentang kinerja pelayanan di RSUD dr. Soedono Madiun didapat nilai sebesar 78,83 dalam kategori “B” dengan kinerja unit pelayanan “baik”.
- Cost recovery rate (CRR) menunjukkan kemampuan rumah sakit dalam mengelola keuangan sesuai kebutuhan operasional dalam satu tahun anggaran (tahun 2017 CRR sebesar 79,24%). Perkembangan cost recovery berjalan fluktuatif. Hal ini disebabkan faktor pendapatan dari pelayanan RS, sebagai imbas dari naik turunnya kunjungan pasien.
- Untuk tingkat kemandirian keuangan rumah sakit, belum bisa memenuhi target yang telah ditetapkan karena sesuai dengan pengelolaan keuangan BLUD saat ini untuk gaji pegawai masih disubsidi dan untuk belanja investasi khususnya alat – alat kedokteran juga masih disubsidi baik dari pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat.

Adapun tabel pencapaian kinerja pelayanan sebagai berikut.

Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RSUD dr. SOEDONO MADIUN

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-10	-10	-12	-12	-13
1.	Prosentase elemen akreditasi yang memenuhi standart	%	20	80	80	90	90	>80	80	90	90	
2	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	81,26 - 100	80,7	80	76	77	78	75,67	78,83	77	78	
3	CRR (cost recovery rate)		84	86	87	88	89	75,99	79,24	88	89	
4	Prosentase indikator SPM (standart pelayanan minimal) yang mencapai target	%	63	82	76	77	78	79,65	83,31	77	78	
5	Prosentase elemen akreditasi RS Pendidikan yang memenuhi standart A	100%	82	82	80	80	80	95		80	80	
	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)											
1	BOR (bed occupacy rate)	60% - 85%	66	60	63	66	70	66,52	66,19	66	70	
2	ALOS (average lenght of stay)	6 - 9 hari	3	6	6	6	6	5	5	6	6	
3	BTO (bed turn over)	40 - 50 kali	78	65	50	45	40	59	58	45	40	
4	TOI (Turn over interval)	1 - 3 hari	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
5	GDR (gross death rate)	≤ 45 ‰	76	60	45	45	40	105,72	98,90	45	40	
6	NDR (nett death rate)	≤ 25‰	38	33	25	27	25	56,61	58,34	27	25	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan untuk BOR, ALOS maupun TOI di RSUD dr. Soedono Madiun tahun 2017 masih dalam batas ideal. Adanya regulasi BPJS yang mengharuskan rujukan berjenjang untuk pasien BPJS dengan mengoptimalkan layanan fasilitas kesehatan di kabupaten/kota/RS type C.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi RSUD dr. Soedono Madiun

- Alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan usulan pendanaan, sehingga mempengaruhi program prioritas yang sedang berjalan (pembangunan terhenti karena keterbatasan anggaran, khususnya pembangunan gedung trauma terpadu dan intensive care)
- Kebutuhan tenaga medis sub spesialis yang masih kurang, sehingga untuk pelayanan sub spesialis pasien harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap
- Untuk pelayanan BPJS di rumah sakit, jumlah pasien yang dilayani tidak seimbang dengan pendapatan (verifikasi persetujuan BPJS)
- Keterbatasan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan khususnya peralatan kedokteran canggih
- Keterbatasan anggaran untuk pengembangan profesionalisme Sumber Daya Aparatur

c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah :

- Dalam menjalankan pelayanan RSUD dr. Soedono Madiun memberikan pelayanan sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal dan selalu berusaha untuk memenuhi kriteria dari SPM tersebut. Selain itu juga mendukung kegiatan MDG's dengan dukungan dari anggaran APBD Provinsi Jawa Timur dalam hal pelayanan terhadap pasien HIV/AIDS, pasien ketergantungan obat, dan pelayanan kepada ibu dan bayi beresiko. Bentuk dukungan tersebut adalah bantuan penyuluhan dengan pembuatan leaflet, transportasi untuk pengambilan reagen, obat-obatan antiviral dan kegiatan unggulan lainnya adalah program home visite untuk pasien beresiko.

d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

- Sejak tahun 2015 MEA atau perdagangan bebas zona Asia, sudah mulai terlihat dengan berbenahnya RS swasta serta munculnya RS baru sekelas RS Siloam yang akan berdiri di Kota Madiun, sehingga RS dituntut untuk berbenah dengan memberikan pelayanan yang lebih profesional dan ketersediaan alat yang mendukung kelancaran pelayanan

- Adanya regulasi Jaminan Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan dengan sistem berjenjang dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan faskes pratama, akan membawa dampak berkurangnya jumlah pasien yang dirawat. Hal ini menjadi peluang bagi RSUD dr. Soedono untuk melakukan inovasi pelayanan / pengembangan pelayanan yang disesuaikan dengan standart RS Klas B Pendidikan dan sesuai regulasi BPJS.

e. Formulasi isu – isu penting

Rekomendasi dan catatan strategis untuk menindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah :

1. Pengembangan SIM RS
2. Pengembangan Trauma dan Critical Center

Tahun 2016 ada proses penyusunan karya perencana untuk pembangunan gedung 10 lantai yang akan dipergunakan untuk Layanan Trauma dan Critical Center, terdiri :

- ✓ Semi Basement : Parkir
- ✓ Lantai 1 : Triase UGD
- ✓ Lantai 2 : VK UGD, Cath Lab
- ✓ Lantai 3 : ICCU dan ICU
- ✓ Lantai 4 : High Care Non Surgical, High Care Ponok
- ✓ Lantai 5 : High Care Surgical
- ✓ Lantai 6 : Recovery Room Publik & Private
- ✓ Lantai 7 : Operating Theatre
- ✓ Lantai 8 : Operating Theatre
- ✓ Lantai 9 : Skill and Science Lab

Pembangunan tahap I Gedung Trauma Center dan Intensive Care dilaksanakan pada tahun 2017 dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pajak Rokok.

3. Pengembangan Layanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas Utama
Layanan rawat jalan dan rawat inap kelas utama diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan khusus dan fasilitas khusus pada pelayanan spesialistik.
4. Pengadaan lahan / pembelian tanah pada tahun 2016, yang akan dipergunakan untuk pengembangan, meliputi : pengembangan rawat inap klas utama, penambahan lahan

parkir karyawan, asrama PPDS, serta untuk pelayanan penunjang dan Diklit / RS Pendidikan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

- a. Program dan Kegiatan di tahun 2018 terdiri dari 4 program rutin, 2 program pembangunan dan 1 program dengan pendanaan fungsional
- b. Program rutin terdiri dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah serta Program Penyusunan, Pengendalian & Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Program pembangunan terdiri dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial
- d. Program yang dibiayai oleh anggaran fungsional yaitu Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Tabel 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018

Nama SKPD : RSUD dr. SOEDONO MADIUN

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Program pelayanan Administrasi perkantoran	Kota Madiun	Indeks Kepuasan Masyarakat / Aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor; Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	3.541.577.277	Program pelayanan Administrasi perkantoran	Kota Madiun	Indeks Kepuasan Masyarakat /Aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor; Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	3.521.577.277	
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kota Madiun	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	80%	3.541.577.277	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kota Madiun	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	80%	3.521.577.277	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Madiun	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	5.600.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Madiun	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	5.600.000.000	
	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Kota Madiun	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	6 paket	4.480.000.000	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Kota Madiun	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	3 paket	4.480.000.000	
	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Kota Madiun	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana prasarana yang terpelihara	150 unit	1.120.000.000	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Kota Madiun	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana prasarana yang terpelihara	200 unit	1.120.000.000	

3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Kota Madiun	Prosentase Kelembagaan yang tepat fungsi	100%	300.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Kota Madiun	Prosentase Kelembagaan yang tepat fungsi	100%	940.509.723
	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Luar Kota Madiun	Jumlah konsultasi	120 kali	132.000.000	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Luar Kota Madiun	Jumlah konsultasi	400 kali	679.684.723
	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Kota Madiun	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan / pelatihan formal; Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	7 orang; 90 orang	168.000.000	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Kota Madiun	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan / pelatihan formal; Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	25 orang; 300 orang	260.825.000
	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	200.000.000	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	215.000.000
4	Penyusunan dokumen perencanaan	Kota Madiun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yg tersusun	6 dokumen	80.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan	Kota Madiun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yg tersusun	6 dokumen	90.000.000
	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Kota Madiun	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	5 dokumen	55.000.000	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Kota Madiun	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	5 dokumen	60.000.000
	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Kota Madiun	Jumlah update database perangkat daerah	4 paket	50.000.000	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Kota Madiun	Jumlah update database perangkat daerah	4 kali	50.000.000

	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Kota Madiun	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	2 dokumen	15.000.000	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Kota Madiun	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	2 dokumen	15.000.000	
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kota Madiun	Prosentase pemenuhan pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana sesuai standart	96,5%	114.266.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kota Madiun	Prosentase pemenuhan pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana sesuai standart	96,5%	19.351.010.954	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)	Kota Madiun	Jumlah pemenuhan sarana prasarana dan peralatan kesehatan yang tersedia	4 paket		Pelayanan Kesehatan (DAK)	Kota Madiun	Jumlah pemenuhan sarana prasarana dan peralatan kesehatan yang tersedia	4 paket	14.351.010.954	
	Penyediaan Sarana / Prasarana Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok)	Kota Madiun	Jumlah Pembangunan Gedung; Jumlah pengadaan alat kesehatan; Jumlah alat yang terpelihara	1 paket 1 paket	114.266.000.000	Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok)	Kota Madiun	Jumlah Pembangunan gedung	1 paket	5.000.000.000	
6	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kota Madiun	Prosentase pelayanan yang memenuhi standart minimal; % pencapaian indikator pelayanan RS; % pegawai RS yang mengikuti pelatihan; % kelulusan peserta didik yang menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS	96,5% 100% 60% 85%	185.500.000.000	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kota Madiun	Prosentase pelayanan yang memenuhi standart minimal; % pencapaian indikator pelayanan RS; % pegawai RS yang mengikuti pelatihan; % kelulusan peserta didik yang menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS	96,5% 100% 60% 85%	190.000.000.000	
	Penguatan pelayanan RS / RS Khusus	Kota Madiun	Prosentase pemenuhan biaya operasional rumah sakit	80%	185.500.000.000	Penguatan pelayanan RS / RS Khusus	Kota Madiun	Prosentase pemenuhan biaya operasional rumah sakit	80%	190.000.000.000	

7	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Kota Madiun	Prosentase pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan operasional	0	0	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Kota Madiun	Prosentase pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan operasional	100%	10.000.000.000	
	Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Kota Madiun	Jumlah bangunan gedung ; Jumlah alat kesehatan	0	0	Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Kota Madiun	Jumlah pembangunan	1 paket	10.000.000.000	
	Penyediaan / pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi dan air bersih	Kota Madiun		0	0	Penyediaan / pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi dan air bersih	Kota Madiun		0	0	

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam perencanaan program adalah adanya masukan pada kritik dan saran diberikan oleh masyarakat melalui kotak saran. Selain itu RSUD dr. Soedono Madiun juga melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 2 kali dalam satu tahun. Survey tersebut kami analisis dan menjadi masukan dalam pengembangan program di RSUD dr. Soedono Madiun. Demikian pula unit – unit kerja instalasi melakukan survey yang dilaksanakan 3 bulan sekali. Untuk melakukan koreksi atas pelayanan agar lebih baik. Selain indeks kepuasan masyarakat, juga dilakukan survey kepuasan masyarakat berdasarkan standart pelayanan minimal yang diadakan 1 tahun 2 kali.

Keberadaan RS juga tidak lepas dari peran masyarakat yang percaya dalam mencari pelayanan kesehatan dan memutuskan untuk berobat ke RS. Dengan kepercayaan masyarakat tersebut, maka kami berusaha melakukan yang terbaik untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui home visite dan promosi kesehatan (pelayanan kesehatan gratis) ditempat – tempat yang jauh dari pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hasil survey IKM diperoleh usulan dari masyarakat sebagai berikut :

- a. Waktu tunggu antrian yang lama dan panjang di loket pendaftaran
- b. Masyarakat memerlukan penyampaian informasi yang jelas dan cepat terkait layanan kesehatan yang diinginkannya (jadwal dokter, tarip, sarana penunjang, informasi layanan penunjang lainnya, pengembangan layanan yang ada, tata tertib rs, layanan pembayaran, tarip pelayanan, dsb)
- c. Masyarakat menginginkan pelayanan yang terpusat (tidak pontang panting karena lokasi yang berjauhan)
- d. Penambahan alat canggih agar tidak perlu dirujuk ke Surabaya atau Solo
- e. Pengunjung kesulitan mendapatkan lokasi parkir kendaraan di area rumah sakit, sehingga harus parkir di luar rumah sakit yang lumayan jauh. Saat ini keadaan parkir di depan rumah sakit menyebabkan kemacetan dan sudah mendapat teguran dari Dinas Perhubungan Kota Madiun
- f. Peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur baik tenaga medis maupun perawat dan tenaga profesionalis yang lainnya

Sehingga dengan melihat usulan masyarakat tersebut, RSUD dr. Soedono Madiun mempunyai prioritas yang ingin dilaksanakan pada tahun 2018 yakni :

1. Pemenuhan sarana prasarana gedung trauma center dan intensive care (tahap II) dimana semua layanan akan terfokus dalam satu lokasi dan masyarakat tidak pontang panting lagi
2. Pemenuhan alat kesehatan canggih yang belum dimiliki
3. Pengembangan sistem informasi rumah sakit, sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan
4. Penurunan angka kematian GDR dan NDR dengan pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur / profesionalisme
5. Pemenuhan sarana prasarana untuk menunjang keberhasilan akreditasi RS versi SNARS

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2018
PROVINSI JAWA TIMUR**

NAMA SKPD : RSUD dr. SOEDONO MADIUN

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Program pelayanan Administrasi perkantoran	Kota Madiun	Indeks Kepuasan Masyarakat /Aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor; Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kota Madiun	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	80%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Madiun	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	
	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Kota Madiun	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	6 paket	
	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Kota Madiun	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana prasarana yang terpelihara	150 unit	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Kota Madiun	Prosentase Kelembagaan yang tepat fungsi	100%	
	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Luar Kota Madiun	Jumlah konsultasi	120 kali	
	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Kota Madiun	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan / pelatihan formal; Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	7 orang; 90 orang	
	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Madiun	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	

	Penyusunan dokumen perencanaan	Kota Madiun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yg tersusun	6 dokumen	
	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Kota Madiun	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	5 dokumen	
	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Kota Madiun	Jumlah update database perangkat daerah	4 kali	
	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Kota Madiun	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	2 dokumen	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kota Madiun	Prosentase pemenuhan pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana sesuai standart	100%	
	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (DAK)	Kota Madiun	Jumlah alat kesehatan	4 paket	
	Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok)	Kota Madiun	Jumlah alat kesehatan	1 paket	
	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kota Madiun	Prosentase pelayanan yang memenuhi standart minimal; % pencapaian indikator pelayanan RS; % pegawai RS yang mengikuti pelatihan; % kelulusan peserta didik yang menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS	96,5% 100% 60% 85%	
	Penguatan pelayanan RS / RS Khusus	Kota Madiun	Prosentase pemenuhan biaya operasional rumah sakit	80%	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, adalah:

Prioritas Nasional 1 **Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar**

Arah Kebijakan :

- a. Mempercepat pengurangan kemiskinan
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat**
- c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
- d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
- e. Meningkatkan tata kelola layanan dasar

Berdasarkan arah kebijakan Nasional tahun 2019 dan dalam kaitan tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Soedono Madiun guna meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang terbaik di lingkungan RSUD dr. Soedono Madiun bagi seluruh lapisan masyarakat, kemudahan akses dalam mendapatkan layanan yang berkualitas diarahkan pada kemudahan administrasi, terjangkau dan dapat memberikan kepuasan kepada seluruh lapisan masyarakat, serta dalam upaya pencapaian Standart Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan, maka ditetapkan **kebijakan** sebagai berikut :

1. Layanan berorientasi pada subject, bukan pada administrasi dalam proses penyembuhan
2. Perubahan lebih baik yang berkelanjutan (continuous improvement) selalu menjadi bagian budaya kerja
3. Meningkatkan pendapatan fungsional dalam mendukung upaya kemandirian pembiayaan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1. Tujuan :

- Meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan rujukan bagi seluruh masyarakat

3.2.2. Sasaran Strategis Renja SKPD :

- ❖ Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pelayanan medis dan penunjang medis
- ❖ Meningkatnya mutu pelayanan manajemen rumah sakit
- ❖ Meningkatnya mutu rumah sakit pendidikan

3.3. Program dan Kegiatan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan :
 - ❖ Pelaksanaan administrasi perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan :
 - ❖ Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana
 - ❖ Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana
- c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah, dengan Kegiatan :
 - ❖ Konsultasi kelembagaan perangkat daerah
 - ❖ Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
- d. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan :
 - ❖ Penyusunan dokumen perencanaan
 - ❖ Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran
 - ❖ Penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi data
 - ❖ Penyusunan laporan pengelolaan keuangan
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan :
 - ❖ Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)
 - ❖ Pelayanan kesehatan (pajak rokok)
- f. Program Pembinaan Lingkungan Sosial; dengan kegiatan :
 - ❖ Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)
- g. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan Kegiatan :
 - ❖ Penguatan pelayanan RS / RS Khusus

Adapun program prioritas tahun 2018 yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Penyelesaian pembangunan gedung trauma center dan intensive care 8 lantai (tahap II)
2. SIM RS (restrukturisasi organisasi IPDE, pengelola IT dan pengembangan SIM berdasarkan master plan SIM RS)
3. Penurunan GDR NDR
4. Persiapan akreditasi RS (SNARS)

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Perubahan dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Provinsi/Kabupaten/Kota : Provinsi Jawa Timur

Nama SKPD : RSUD dr. Soedono Madiun

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		PD Penanggungjawab			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<u>1</u>	-	-	-	URUSAN WAJIB	-	-	256.062.709.829	-	-	-	315.917.305.843	-	
1	02			KESEHATAN			256.062.709.829				315.917.305.843		
				[1.02.0400] RUMAH SAKIT UMUM DR. SOEDONO MADIUN			256.062.709.829				315.917.305.843		
1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor		100 %	3.521.577.277	APBD		100.00 %	4.693.305.843	(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1	02	01	019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	Kota Madiun	80 %	3.521.577.277	APBD		100 %	4.693.305.843	(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		100 %	5.600.000.000	APBD		100.00 %	6.000.000.000	(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1	02	02	012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	Kota Madiun	6 Paket/Unit	4.480.000.000	APBD		6 Paket/Unit	4.920.000.000	(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1	02	02	031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	Kota Madiun	150 Paket/Unit	1.120.000.000	APBD		150 Paket/Unit	1.080.000.000	(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1	02	07		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi		100 %	940.509.7230	APBD		100.00 %	300.000.000	(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun

1	02	07	001	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	Kota Madiun	120 kali	679.684.723	APBD		120 kali	132.000.000	(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1	02	07	002	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	Kota Madiun	7 orang	260.825.000	APBD		7 orang	168.000.000	(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
					Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	Kota Madiun	90 orang				90 orang		(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1	02	08		<i>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	<i>persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu</i>		100 %	215.000.000	APBD		100.00 %	200.000.000	(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1	02	08	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Kota Madiun	6 Dokumen	90.000.000	APBD		6 Dokumen	80.000.000	(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1	02	08	002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	Kota Madiun	5 Dokumen	60.000.000	APBD		5 Dokumen	55.000.000	(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1	02	08	003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah kegiatan evaluasi berkala update data base OPD	Kota Madiun	4 Paket	50.000.000	APBD		4 Paket	50.000.000	(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1	02	08	004	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	Kota Madiun	2 Dokumen	15.000.000	APBD		2 Dokumen	15.000.000	(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1	02	47		<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)</i>	<i>Prosentase pemenuhan pengadaan, peningkatan sarana prasarana sesuai standart</i>		97 %	19.351.010.954	APBD		97.00 %	116.724.000.000	(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1	02	47	016	Pelayanan Kesehatan (DAK)		Kota Madiun	1 kegiatan	14.351.010.954	APBD				(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1	02	47	020	Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok)	Jumlah kegiatan promotif prefentif dalam dan luar gedung	Kota Madiun	1 kegiatan	5.000.000.000	APBD		1 kegiatan	116.724.000.000	(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun

					Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan	Kota Madiun	1				0		(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
					Jumlah Alat yang terpelihara	Kota Madiun	0				0		(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1	02	48		Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Prosentase pelayanan yang memenuhi standart pelayanan minimal		97 %	216.434.611.875	APBD		97.00 %	188.000.000.000	(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
					% pencapaian indikator Pelayanan RS		100 %				100.00 %		(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
					% pegawai RS yg mengikuti pelatihan		60 %				60.00 %		(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
					% kelulusan peserta didik yg menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS		85 %				85.00 %		(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1	02	48	001	Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus	Prosentase pemenuhan biaya operasional rumah sakit	Kota Madiun	80 %	216.434.611.875	APBD		82 %	188.000.000.000	(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1	06	43		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan operasional	Kota Madiun	100%	10.000.000.000	APBD		100%		(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1	06	43	006	Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan sarana / prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan				10.000.000.000	APBD				(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
1	06	43	007	Penyediaan / pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi dan air bersih					APBD				(1.02.04.00) Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
Total								256.062.709.829				315.917.305.843	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2018 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

RSUD dr. Soedono Madiun dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi 1: "MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN", khususnya mendukung capaian pada Sasaran 7 dari misi 1, yaitu "MENINGKATNYA PELAYANAN KESEHATAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL".

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Kesehatan, RSUD dr. Soedono Madiun dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 adalah sesuai isu strategis pembangunan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah yakni penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)

4.1. Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional Tahun 2018 :

-

Prioritas Provinsi Tahun 2018 :

-

4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Tabel. 4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Tabel 4.2. Prioritas Perangkat Daerah

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
Peningkatan sarana prasarana pelayanan trauma center dan intensive care	1 gedung trauma center dan intensive care	RSUD dr. Soedono Madiun	1.02.47	Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Pelayanan BLUD Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Pelayanan kesehatan (pajak rokok)	15.000.0000.000	Gd. Trauma Center
			1.02.43.006		10.000.000.000	
	2 paket alat kesehatan	RSUD dr. Soedono Madiun	1.02.48	Program Peningkatan Pelayanan BLUD Penguatan pelayanan RS / RS Khusus	2.626.625.000	
			1.02.48.001		2.626.625.000	
			1.02.47	Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Pelayanan BLUD Pelayanan Kesehatan (DAK)	14.351.010.954	
			1.02.47.016		14.351.010.954	
Penurunan angka GDR dan NDR	GDR ≤ 45 % NDR ≤ 25 %	Kota Madiun, Kab Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan (Regional RS Rujukan)	1.02.48	Program Peningkatan Pelayanan BLUD Penguatan pelayanan RS / RS Khusus	216.434.611.875	
			1.02.48.001		216.434.611.875	
Pengembangan sistem Informasi / SIM RS yang mandiri dan terintegrasi	1 aplikasi		1.02.48	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	402.755.000	
			1.02.48.001	Penguatan pelayanan RS / RS Khusus	402.755.000	
JUMLAH					248.815.002.829	

4.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja Perangkat Daerah dan pendanaan RSUD dr. Soedono Madiun Tahun 2019 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, adalah sebagaimana tabel rencana Program dan Kegiatan pada Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 RSUD dr. Soedono Madiun ini kami susun. RSUD dr. Soedono Madiun berusaha untuk terus meningkatkan profesionalitas dan performance melalui peningkatan kualitas SDM dan penambahan sarana prasarana. Selain itu peningkatan pengembangan dalam bidang IT berupa SIM-RS untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal

Guna mewujudkan program tersebut, kami anggarkan untuk tahun 2018 dalam APBD Perubahan belanja langsung sebesar Rp. 256.062.709.829,-. Alokasi tersebut dipergunakan untuk program pelayanan administrasi perkantoran Rp. 3.521.577.277,-; program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 5.600.000.000,-; program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah sebesar Rp. 940.509.723,-; program penyusunan pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintah Rp. 215.000.000,-; program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp. 19.351.010.954,- ; program pembinaan lingkungan sosial Rp. 10.000.000.000,- dan program peningkatan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp. 216.434.611.875,-

Sumber anggaran untuk operasional kegiatan tahun 2018 berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur dan anggaran fungsional. Untuk anggaran subsidi diharapkan tambahan alokasi anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) dan pajak rokok serta DBHCHT.

Bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat sangat kami harapkan guna terpenuhinya kelancaran pelayanan kesehatan agar visi Pemerintah Jawa Timur dapat terlaksana.

Atas perhatian dan kebijaksanaan yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Madiun, Agustus 2018


DIREKTUR RSUD dr. SOEDONO MADIUN

dr. BANGUN TRAPSILA PURWAKA, Sp. OG(K), M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19601021 198511 1 001

